



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA**

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda merupakan salah satu Unit Kerja Pemerintah di bawah Badan Kebijakan Transportasi. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki tugas untuk melaksanakan Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda. Termasuk di dalamnya adalah merumuskan langkah – langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran kegiatan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya. Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan Analisis Kebijakan dengan subsektor di Lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan Analisis Kebijakan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi hasil analisis yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon I Badan Kebijakan Transportasi dan Unit Eselon II di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan Para Kepala Daerah serta *stakeholders* terkait yang memerlukan rekomendasi kebijakan atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Prasarana transportasi, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda telah melaksanakan sasaran tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah direncanakan selama Tahun 2024, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang sudah terselesaikan meliputi beberapa kajian, diantaranya: Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan; Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN; Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata; Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia; Pengoperasian Banda Udara Perairan; Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara; Evaluasi Program Angkutan Udara Perintis di Wilayah Papua dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; Standar

Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN; Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai; Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia melalui Angkutan Kontainer; Capaian Kinerja Sektor Transportasi Udara 2015-2024; Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan; Integrasi Moda pada Simpul Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Merak; Optimalisasi Konektivitas Tol Laut dengan Angkutan Penyeberangan; Integrasi BRT Balikpapan City Trans dengan Angkutan Perkotaan.

Pada Tahun 2024, nilai rata – rata kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda secara keseluruhan ditunjukkan melalui nilai capaian terhadap target PK 103,9%. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp21. 422.312.418 dibandingkan dengan Pagu Awal sebesar Rp21.445.604.000, maka daya serap adalah sebesar 99,89%, dimana seluruhnya termasuk dalam kategori belanja barang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sepanjang Tahun 2024. Di dalamnya memuat pencapaian program, evaluasi kinerja, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang andal, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal Kementerian Perhubungan maupun mitra kerja eksternal yang terkait. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan prasarana transportasi dan integrasi moda di Indonesia.



Jakarta, 25 Januari 2025

Kepala

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan
Integrasi Moda

CAPT. Novyanto Widadi, S.AP., M.M

NIP 196811232016111001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Unit Kerja	3
1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja	5
1.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan	7
1.5 Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	10
2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	20
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja	21
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	33
3.4 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	38
LAMPIRAN	vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2024	5
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2024	6
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum per 31 Desember 2024	6
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabfung Analis Kebijakan per 31 Desember 2024 ...	6
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024	16
Tabel 2.2 Judul Analisis Kebijakan Terencana Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	18
Tabel 2.3 Judul Analisis Kebijakan Isu Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	18
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Tahun 2024	21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Tahun 2020-2024	34
Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	3
Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi 2024	14
Gambar 2.2 <i>Cascading</i> Lintas Unit Eselon 1 sebagai <i>Proses Mirroring</i> dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan	15



BAB

1

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024 disusun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari Eselon II ke atas harus mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas rencana kinerja yang telah diperjanjikan dengan target yang diinginkan untuk tercapai. Penyusunan laporan kinerja Badan Kebijakan Transportasi berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini yang dipertanggungjawabkan bukan hanya LKIP, tetapi SAKIP dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan akuntabilitas ini dimaksudkan untuk dapat melihat seberapa besar manfaat atau hasil yang dicapai Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja penyelenggaraan Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Unit Kerja

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
2. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
3. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
4. Penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
6. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; dan
7. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Susunan Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berserta fungsinya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Pada struktur organisasi ini terdapat satu jabatan setingkat eselon II, dua jabatan eselon III, dan kelompok jabatan fungsional

1. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberi rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- d) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- e) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda; dan
- f) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda.

2. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- d) Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Jumlah pegawai Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sampai 31 Desember 2024 sebanyak 52 orang dengan komposisi pegawai Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berdasarkan golongan, pendidikan, dan jabatan structural masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3, berikut ini:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2024

NO.	JENIS GOLONGAN	TAHUN 2024
1.	Golongan IV	8
2.	Golongan III	35
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	-
5.	PPPK	3
6.	PPNPN	3
Jumlah Pegawai		52

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2024

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2024

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2024
1.	S2	18
2.	S1	28
3.	Diploma III	3
4.	Diploma II	2
5.	Diploma I	1
Jumlah Pegawai		52

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2024

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2024
1.	Struktural	3
2.	Analisis Kebijakan	23
3.	Perencana	3
4.	Statistik	2
5.	Pranata Komputer	3
6.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	2
7.	Non Fungsional	16
Jumlah Pegawai		52

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2024

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabfung Analisis Kebijakan per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2024
1.	Analisis Utama	1
2.	Analisis Madya	3
3.	Analisis Muda	4
4.	Analisis Pertama	15
Jumlah Pegawai		23

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2024

1.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

Kemampuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk membangun organisasi yang sehat dan manajemen yang bersih serta transparan sudah dioptimalkan. Keadaan ini tampak dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai lembaga pemberi masukan kebijakan dalam bidang prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, namun keterbatasan jumlah pegawai, dan alokasi anggaran menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam melaksanakan kegiatan kajian kebijakan.

Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang sudah terselesaikan meliputi beberapa kajian isu strategis diantaranya: Capaian Kinerja Sektor Transportasi Udara 2015-2024; Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan; Integrasi Moda pada Simpul Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Merak; Optimalisasi Konektivitas Tol Laut dengan Angkutan Penyeberangan; Integrasi BRT Balikpapan City Trans dengan Angkutan Perkotaan dan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda juga memiliki kajian terencana diantaranya: Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan; Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN; Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata; Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia; Pengoperasian Bandar Udara Perairan; Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara; Evaluasi Program Angkutan Udara Perintis di Wilayah Papua dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN; Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai; Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia Melalui Angkutan Kontainer.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi menjadi kendala pelaksanaan kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM Analisis Kebijakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Analisis Kebijakan di bidang Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, ke depannya akan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk diikutsertakan dalam kegiatan analisis kebijakan sebagai narasumber dan dewan pakar, dengan harapan kemampuan SDM analisis kebijakan sekaligus dapat ditingkatkan melalui *sharing* informasi dari narasumber.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Tahapan Pengukuran Kinerja
- b. Pengukuran Capaian Kinerja
- c. Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Tahun 2024
- d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Tahun 2024 serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian
- e. Analisis Sumber Daya Keuangan
- f. Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya
- g. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.



BAB

2

**Perencanaan
Kinerja**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Dokumen Rencana Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor SK 145 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kebijakan Transportasi untuk periode lima tahun, terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJM Nasional 2020–2024) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap Keempat Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi menjadi pedoman dan komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan strategis serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dalam kurun waktu 2020–2024. Rencana strategis dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan.

Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan Analisis dan pengembangan di bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan Analisis kebijakan transportasi bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran kegiatan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan Analisis dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan Analisis. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi hasil Analisis yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi.

Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Transportasi dan Unit Eselon 2 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah serta stakeholder terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan. Dalam mencapai target kinerja yang optimal Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki Visi, Misi, dan Tujuan untuk mencapai sasaran organisasi.

VISI

Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi 2020-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada Tahun 2020- 2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (*Center of Excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat dan manfaat guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Dukungan pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dilakukan melalui perannya sebagai penyusun kebijakan bidang transportasi melalui pelaksanaan kegiatan Analisis dan pengembangan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

MISI

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi **sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif**, ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, spesial (HITS).
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge-based policy*).
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi.
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi.

Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

TUJUAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Kebijakan Transportasi dengan memperhatikan Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, maka Tujuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;

2. Terwujudnya dukungan tata kelola Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator pada tujuan yang selanjutnya dijabarkan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2020-2024 disusun dengan berbasis pada *outcome*. Dimana *outcome* yang dimaksud berasal dari capaian sasaran kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran kegiatan ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Transportasi serta tujuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada Tahun 2020-2024. Penjabarannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal proses perspective* sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi;
- b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit Eselon II, Sasaran Program Pertama (SP.1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK.1) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK 1: Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)

IKK 2: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)

IKK 3: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK

IKK 4: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK (t-2)

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Kedua (SP.1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK.2) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Perhubungan, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

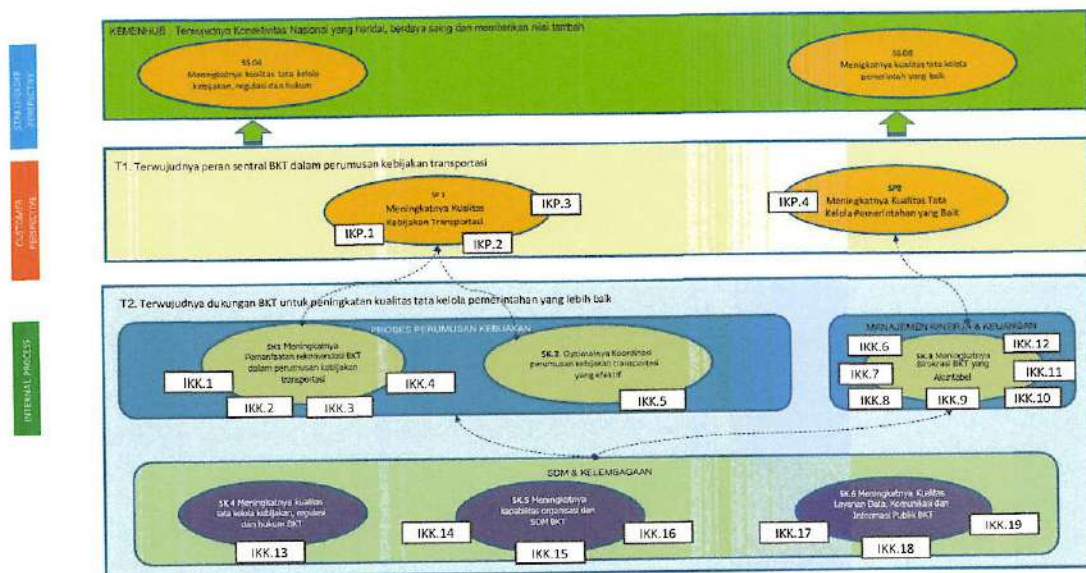
IKK 5: Tingkat Kemanfaatan Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan pada Tahun Berjalan.

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Kedua (SP.2) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK.3) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi yang Akuntabel, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

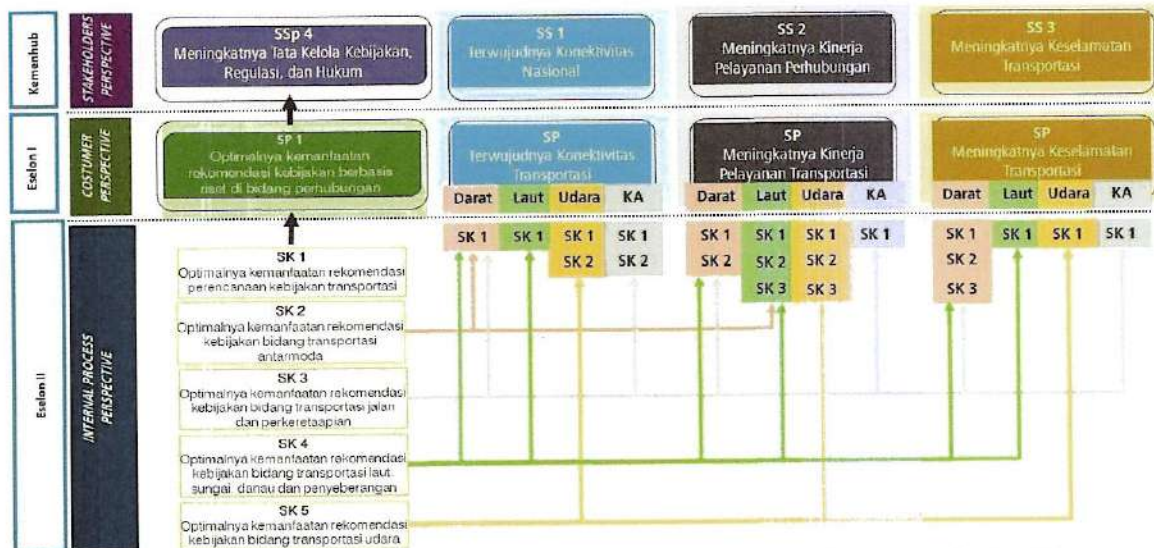
- IKK.6: Tingkat Maturitas SPIP yang Terintegrasi
- IKK.7: Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi
- IKK.8: Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi
- IKK.9: Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi
- IKK.10: Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi
- IKK.11: Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi
- IKK.12: Indeks Penyelenggaraan Perkantoran

Selengkapnya, Peta Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan *Cascading Lintas Unit Eselon 1* sebagai Proses *Mirroring* dengan Sektor Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi 2024 (Sumber: RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024)

Peta strategis tersebut menjadi dasar turunan penyusunan sasaran strategis unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Badan Kebijakan Transportasi dapat merepresentasikan kinerja organisasi secara menyeluruh. Sehingga kinerja Pusjak Prasarana dan Integrasi Moda tidak hanya dari keberhasilan pemenuhan kebutuhan *stakeholders* juga dalam pengembangan proses bisnis yang efektif dan efisien melalui peningkatan kinerja analisis itu sendiri, kapasitas SDM, tata Kelola dan manajemen organisasi serta anggaran.



Gambar 2.2 Cascading Lintas Unit Eselon I sebagai Proses Mirroring dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan

Gambar di atas memperlihatkan untuk kelompok *stakeholder perspective*, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengikuti strategi di tingkat Kementerian Perhubungan, pada Sasaran Strategis Penunjang ke-empat (SSp 4) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum dengan Indikator Kinerja Strategis Penunjang ke-empat (IKSp 4): Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum. Selain SSp 4, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pun mengikuti Sasaran Strategis Penunjang Kementerian Perhubungan yang ke-delapan (SSp 8) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Hal ini mengingat tugas dan fungsi organisasi, yaitu peran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai unit kerja penunjang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perhubungan.

2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja

Target kinerja kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun secara berjenjang. Adapun penjabaran dari Peta Kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dituangkan dalam indikator kinerja kegiatan dan targetnya. Penetapan kinerja pada awal tahun anggaran mengikuti konsep Rencana Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90
		IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	39
		IKK 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK	%	90
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Prasarana Transportasi yang Diselaraskan pada Tahun Berjalan	%	100

	Integrasi moda yang efektif				
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP yang Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	85
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda	Indeks	90,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	77
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	87
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	74

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melaksanakan kegiatan Analisis kebijakan terkait isu strategis di sektor transportasi udara. Pada Tahun 2024, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda telah menyelesaikan 15 (lima belas) Analisis kebijakan, judul dari Analisis kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.2 Judul Analisis Kebijakan Terencana Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

NO	JUDUL ANALISIS KEBIJAKAN
1	Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
2	Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN
3	Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata
4	Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia
5	Pengoperasian Banda Udara Perairan
6	Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara
7	Evaluasi Program Angkutan Udara Perintis di Wilayah Papua dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
8	Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN
9	Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai
10	Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia melalui Angkutan Kontainer

Tabel 2.3 Judul Analisis Kebijakan Isu Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

NO	JUDUL ANALISIS KEBIJAKAN
1	Capaian Kinerja Sektor Transportasi Udara 2015-2024
2	Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan
3	Integrasi Moda pada Simpul Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Merak
4	Optimalisasi Konektivitas Tol Laut dengan Angkutan Penyeberangan
5	Integrasi BRT Balikpapan City Trans dengan Angkutan Perkotaan

The background of the cover is a photograph of an airport tarmac. It features a red aircraft being serviced by a ground support vehicle on the left, and a yellow taxi on the right. The tarmac has various markings and shadows. The sky is blue with scattered white clouds. The entire image is decorated with several circular and semi-circular overlays in shades of blue, orange, and yellow. A large black circle with a white number '3' is positioned in the center-left, and a yellow and black banner is on the right.

3

BAB

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan atau sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dilakukan melalui pengukuran terhadap capaian kinerja setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah melalui proses revisi.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Pengukuran Kinerja diawali dengan identifikasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terbaru dari Perjanjian Kinerja yang diukur tiap bulan, triwulan maupun tahunan. Tahapan pengukuran kinerja saat ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yakni e-performance dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, dan II secara mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya. Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian target realisasi, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyusun Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang dilaporkan tiap bulan yang disusun dalam bentuk kertas kerja dengan berisikan format tabel target dan realisasi kinerja yang dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Disamping itu, disusun juga laporan evaluasi terhadap program kegiatan yang diukur setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran. Monitoring capaian kinerja output kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan aplikasi e-Monev PP 39 dengan alamat <http://emonev.bappenas.go.id>.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan sasaran kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, maka target dan realisasi kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKP)	SATUAN	TARGET	VOLUME KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA TAHUNAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET PK
SK 1	IKK 1					
	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90	14	98,21	109,12
	IKK 2					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	39	4	39	100
	IKK 3					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK	%	90	3	99	110

	IKK 4					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK (t-2)	%	32	-	-	-
SK 2	IKK 5					
	Tingkat Kemanfaatan Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada Tahun Berjalan	%	100	6	86	86
SK 3	IKK 6					
	Tingkat Manuritas SPIP Terintegrasi	Level	3	1	3	100
	IKK 7					
	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	85	2	100	117,65
	IKK 8					
	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	90,2	1	70	77,61

IKK 9						
Nilai	SAKIP	Nilai	81	9	79,14	97,7
Badan						
Kebijakan						
Transportasi						
IKK 10						
Indeks	Indeks	77	1	100	129,87	
Pengelolaan						
BMN	Badan					
Kebijakan						
Transportasi						
IKK 11						
Kualitas	%	87	1	92,86	106,74	
Pelaksanaan						
Kerjasama						
dan						
Kemitraan						
Badan						
Kebijakan						
Transportasi						
IKK 12						
Indeks	Indeks	74	4	80,46	108,73	
Penyelenggaraan						
Perkantoran						

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja pada Tahun 2024 ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi IKK 1 s.d 12 tercapai pada Triwulan ke III, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan dan koordinasi rancangan kebijakan di bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berjalan sesuai dengan target baik sesuai dengan anggaran maupun kinerja dan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis berjalan sesuai target baik anggaran maupun kinerja. Adapun Hambatan dikarenakan Proses Pengerjaan RAB dan KAK yang

belum maksimal. Deskripsi mengenai capaian untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 1

Sasaran Kegiatan ke-1 adalah Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi. Pencapaian sasaran kegiatan kesatu diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 1 Presentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)

Hasil penelitian yang menjadi bahan masukan/rekomendasi bagi pengambilan kebijakan menjadi indikator untuk mengukur sasaran program optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan. Jumlah penelitian tahun 2024 yang dilaksanakan dengan skema kontraktual dan swakelola yang ditindaklanjuti rekomendasinya oleh stakeholder terdapat sebanyak 8 (delapan) laporan, yakni:

- a) Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN;
- b) Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata;
- c) Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia;
- d) Pengoperasian Banda Udara Perairan;
- e) Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara;
- f) Evaluasi Program Angkutan Udara Perintis di Wilayah Papua dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- g) Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN;
- h) Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia melalui Angkutan Kontainer.

2. IKK 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)

Kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil rekomendasi analisis kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pada Tahun 2024 dilaksanakan untuk memantau pemanfaatan hasil-hasil rekomendasi analisis kebijakan yang telah dilaksanakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan

Integrasi Moda pada tahun t-2 (tahun 2022). Monitoring tindak lanjut hasil rekomendasi analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) laporan, yaitu:

- 1) Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara;
- 2) Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Aset di Sektor Transportasi Udara;
- 3) Pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Sektor Transportasi Udara;
- 4) Potensi Land Value Capture dalam Pengembangan Transportasi Masal.

3. IKK 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK

IKK 3 merupakan capaian penyusunan rekomendasi rumusan NSPK yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Capaian IKK 3 pada Tahun 2024 sebesar 100%. Capaian untuk IKK 3 pada Tahun 2024 telah sesuai target yang telah ditetapkan dengan sebanyak 2 (dua) laporan, yaitu:

- a) Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- b) Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai.

4. IKK 4. Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK (t-2)

Proses pelaksanaan rekomendasi rumusan NSPK (t-2) merupakan capaian hasil pelaksanaan (t-2) capaian IKK 4 pada Tahun 2024, namun tidak dapat dilakukan perhitungan karena pada (t-2) Tahun 2022 tidak terdapat kajian dengan output NSPK.

B. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 2

Sasaran Kegiatan ke-2 adalah Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda yang efektif. Indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam sasaran kegiatan ke-2 adalah **IKK 5**.

Tingkat Kemanfaatan Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada Tahun Berjalan. Terdapat 6 kegiatan dalam penilaian presentase perumusan kebijakan IKK 5, 6 kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi perencanaan strategis dan pemetaan isu/agenda mapping;
- b) Penyelenggaraan konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan;
- c) Dukungan harmonisasi rancangan kebijakan;
- d) Pendampingan perencanaan, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan;
- e) Peningkatan kendali mutu;
- f) Perangkat pengolahan data.

C. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 3

Sasaran Kegiatan ke-3 adalah Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda Yang Akuntabel. Pencapaian sasaran kegiatan ke-3 diwujudkan melalui 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 6. Tingkat Manuritas SPIP Terintegrasi

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: PR.201/1/8/SK3 2024 Perihal: Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "**terdefinisi**" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "3,835".

Dengan tingkat maturitas "**terdefinisi**", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Berdasarkan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2024, telah dilaksanakan upaya perbaikan seperti :

- a) Telah dilaksanakan Kick off Meeting Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024;
- b) Telah dilaksanakan Bimtek SPIP Terintegrasi Tahun 2024;
- c) Persiapan Penyusunan Penilaian Risiko di Lingkungan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- d) Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko dan Data Dukung Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berdasarkan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2024.

2. IKK 7. Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi

Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek,

baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman, dan penganggaran.

Indikator untuk menilai kualitas perencanaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran Badan Kebijakan Transportasi (minimal 1 kali dalam 5 tahun) dengan bobot 20%;
2. Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran PN, dalam RKP dengan bobot 40%;
3. Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Nilai Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengikuti Nilai Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi dengan Nilai Indeks pada Tahun 2024 sebesar 100%.

3. IKK 8. Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi

Mengadopsi dari Permendagri No.19 Tahun 2020, Pasal 1, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

- a) Kinerja anggaran dengan bobot 60%;
- b) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%.

Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi ,telah mencapai kinerja Indeks 100;

4. IKK 9. Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result-oriented government).

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

- a) Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
- b) Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%
- c) Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%

Realisasi Nilai SAKIP dari Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun 2024 sesuai Surat Itjen Nomor PS.302/7/2/ITJEN/2024 Tanggal 1 Agustus 2024. Kegiatan SAKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024;
- b) Penyusunan LKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda TA 2024;
- c) Penyusunan LKIP Triwulan I TA 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- d) Penyusunan LKIP Triwulan II TA 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- e) Penyusunan LKIP Triwulan III TA 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- f) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Januari TA.2024;
- g) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Februari TA 2024;
- h) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Maret TA 2024;
- i) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan April TA 2024;
- j) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Mei TA 2024;
- k) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Juni TA 2024;

- l) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Juli TA 2024;
- m) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Agustus TA 2024;
- n) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan September TA 2024;
- o) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Oktober TA 2024;
- p) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan November TA 2024;
- q) Pengisian aplikasi e Performance Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- r) Penyusunan Laporan Evaluasi Akhir Periode Renstra;
- s) Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 1 Tahun 2024;
- t) Penyusunan Renaksi Tahunan 2024.

5. IKK 10. Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi

Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik. Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dihitung berdasarkan tingkat pencapaian penetapan status penggunaan (PSP) BMN dan tingkat kepatuhan pelaporan BMN (Laporan BMN Semester 1, Semester 2/Tahunan, dan Laporan Wasdal).

Penilaian Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda terdiri dari 2 indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%). Nilai Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengacu nilai Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi karena pengelolaan BMN di Kelola oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan IKK 10 yang telah di laksanakan sampai akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan CaLBMN Tahunan TA 2024 Badan Kebijakan Transportasi;
 - b. Penyusunan Laporan Wasdal Semester 1 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi;
 - c. Penyusunan Laporan Wasdal Semester 2 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi;
 - d. Penyusunan Laporan Wasdal Tahunan 2024 Badan Kebijakan Transportasi;
 - e. Penyusunan Laporan BMN Semester 2 Tahun Anggaran 2024;
 - f. Penyusunan Laporan BMN Semester 1 Tahun Anggaran 2024;
 - g. Rapat Finalisasi Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP-PHB 386 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.
 - h. Rapat Usulan Penghapusan BMN Peralatan dan Mesin dan Optimaliasasi Perawatan Gedung Bangunan;
 - i. Penyusunan Laporan Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keunagan dan Penilaian kinerja pengelolaan BMN Berdasarkan IKPBMN;
 - j. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025.
- 6. IKK 11. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi**

Pada Tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi menjalin Kerjasama dengan stakeholders transportasi, diantaranya:

- a. Tanggal 25 Januari 2024, Nota Kesepahaman antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Padjajaran tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi;
- b. Tanggal 2 february 2024, Kesepakatan Bersama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Airlangga tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi;
- c. Tanggal 5 Maret 2024, Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen, d Bidang Transportasi;
- d. Tanggal 13 Maret 2024, Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan

dengan Universitas Indonesia tentang Penyusunan Kebijakan Bidang Transportas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- e. Tanggal 26 Maret 2024, Kesepakatan Kerja Sama antara Pusat kebijakan Sarana Transportasi dengan Universitas Airlangga tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Review Regulasi terkait Pelanggaran Pesawat Udara Tanpa Awak;
 - f. Tanggal 29 April 2024, Kontrak Swakelola antara Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dengan Universitas Airlangga tentang Swakelola Pengadaan Review Regulasi terkait Pelanggaran PUTA;
 - g. Tanggal 12 Agustus 2024, Perjanjian kerja Sama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. tentang Fasilitas Pembayaran Penghasilan Pegawai;
 - h. Tanggal 8 Oktober 2024, Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Bidang Transportasi;
 - i. Tanggal 8 Oktober 2024, Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kebijakan Transportasi Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi di Lingkungan kementerian Perhubungan.
- 7. IKK 12.** Indeks Penyelenggaraan Perkantoran, telah mencapai kinerja Indeks 100.
- a) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai;
 - 2) Perbaikan Peralatan Kantor;
 - 3) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2;
 - 4) Langganan Daya dan Jasa;
 - 5) Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan;
 - 6) Pembayaran Honor Pramubakti dan Sopir;
 - 7) Pembayaran Honor Pengelola Anggaran.
 - b) Administrasi Penyusunan Program
 - 1) Penyusunan dan pembahasan RKA-KL Tahun 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
 - 2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2024;
 - 3) Penyusunan Program dan Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun 2024.

c) Administrasi Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu Strategis

Melakukan kegiatan analisis kebijakan terencana 10 (sepuluh) kajian dengan judul sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- 2) Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN;
- 3) Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata;
- 4) Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia;
- 5) Pengoperasian Banda Udara Perairan;
- 6) Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara;
- 7) Evaluasi Program Angkutan Udara Perintis di Wilayah Papua dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- 8) Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN;
- 9) Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai;
- 10) Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia melalui Angkutan Kontainer.

Melakukan kegiatan rekomendasi analisis kebijakan 5 (lima) isu strategis dengan judul sebagai berikut:

- 1) Capaian Kinerja Sektor Transportasi Udara 2015-2024;
- 2) Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan;
- 3) Integrasi Moda pada Simpul Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Merak;
- 4) Optimalisasi Konektivitas Tol Laut dengan Angkutan Penyeberangan;
- 5) Integrasi BRT Balikpapan City Trans dengan Angkutan Perkotaan.

Melakukan kegiatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)

- 1) Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara;
- 2) Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Aset di Sektor Transportasi Udara;
- 3) Pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Sektor Transportasi Udara;
- 4) Potensi Land Value Capture dalam Pengembangan Transportasi Masal.

- d) Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 2) Penyusunan Laporan Tahunan
 - 3) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024
 - 4) Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024
 - 5) Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran
 - 6) SPIP
- e) Layanan Manajemen Keuangan
 - 1) Pengelolaan BMN
 - 2) Pengelolaan Ketatausahaan, Umum, dan SDM Penunjang Teknis Transportasi Udara
- f) Administrasi Publikasi dan Kehumasan
 - 1) Penerbitan Jurnal
 - 2) Penyusunan Database

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mampu mengerjakan kegiatan analisis kebijakan. Dengan jumlah SDM analisis kebijakan sebanyak 23 pegawai dengan beberapa staf dan tenaga honorer, maka SDM yang ada dinilai cukup efisien untuk mengerjakan kegiatan analisis kebijakan sebanyak 15 kajian tahun berjalan dan 4 kajian hasil pemanfaatan rekomendasi kebijakan t-2. Efisiensi SDM yang ada juga didukung oleh keterlibatan pihak instansi/stakeholder dibidang transportasi, perguruan tinggi, dan lainnya yang dijadikan narasumber dalam setiap kegiatan analisis kebijakan sehingga kegiatan analisis kebijakan dapat berjalan dan dapat diselesaikan dengan baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp21.422.312.418 Apabila dibandingkan dengan pagu awal sebesar Rp25.222.018.000 yang direvisi menjadi Rp23.033.375.000 dengan pagu efektif sebesar Rp21.445.604.000 maka daya serap adalah sebesar 99.89% yang dimana seluruhnya merupakan belanja barang.. Tingkat capaian daya serap anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Tahun 2020-2024

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2020	24.095.758.000	23.850.280.109	98,98
2021	21.024.286.000	20.706.646.148	98,49
2022	7.143.056.000	7.119.120.494	99,66
2023	21.554.223.000	21.532.113.181	99,89
2024	21. 445.604.000	21. 422.312.418	99,89

Jika dilihat dari output fisik yang dihasilkan, penyerapan anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dapat dikatakan baik. Selama pelaksanaan anggaran Tahun 2024, pengelola keuangan berusaha untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran agar dapat terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan.



4

BAB

Penutup

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada Tahun 2024 serta sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda telah menggunakan target berbasis outcome yang telah sesuai dengan konsep Rencana Strategis 2024 – 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90
		IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	39
		IKK 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK	%	90
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda NSPK (t-2)	%	32

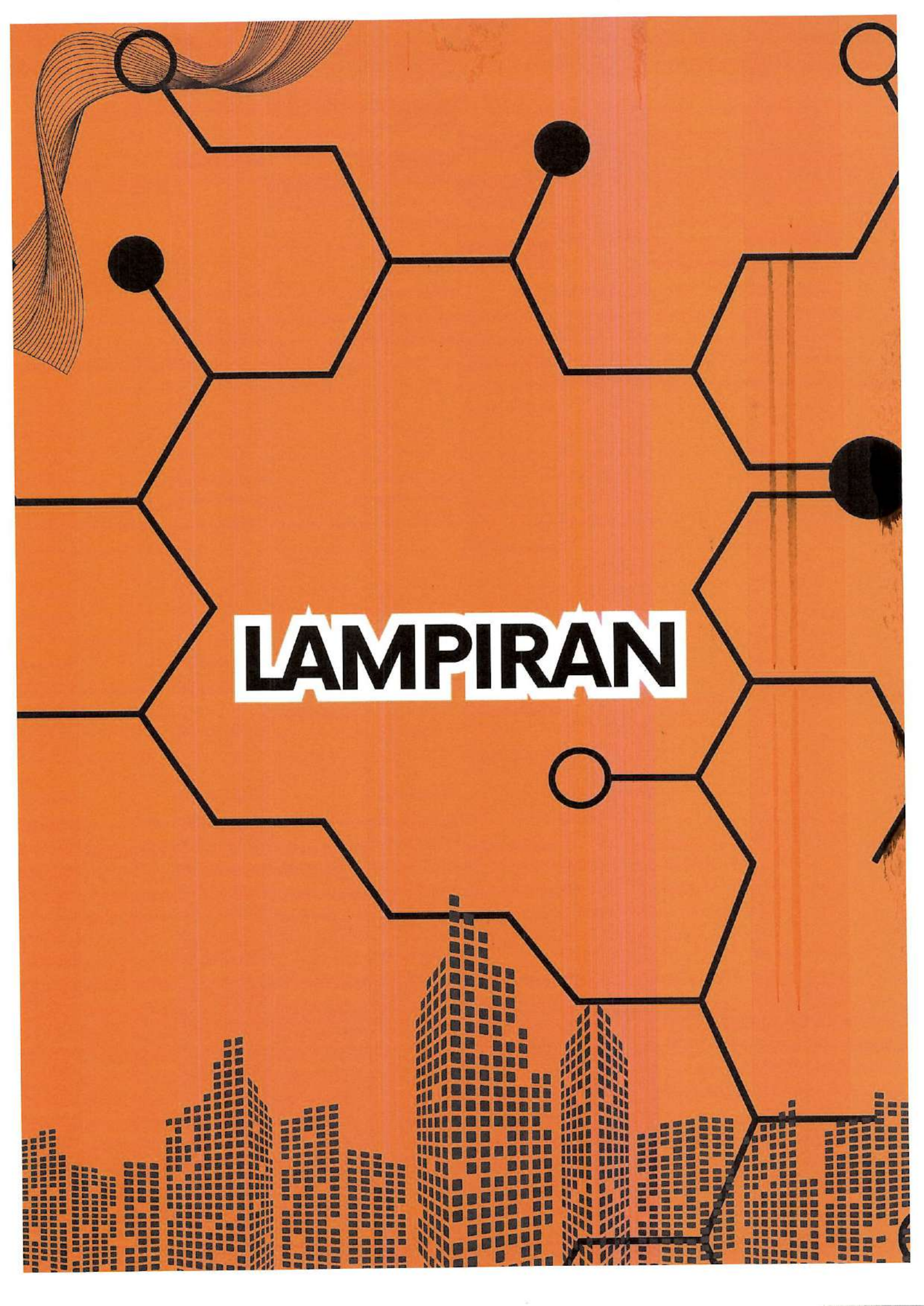
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda yang efektif	IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan di Bidang Prasarana Transportasi yang Diselaraskan pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP yang Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	85
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda	Indeks	90,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	77
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	87
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	74

Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu adanya implementasi manajemen kinerja yang baik melalui pengaturan kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pimpinan dan pelaksana, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal guna mencapai target kinerja. Pada Tahun Anggaran 2024, Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebesar Rp21.445.604.000 dengan daya serap adalah sebesar 99.89%.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di Tahun 2025 seperti :

1. Perlunya pembuatan sistem kontrol pelaporan dan kinerja serta dokumentasi secara digital dan online, untuk mendukung kegiatan strategis maupun untuk kegiatan rutin di luar penyusunan rekomendasi kebijakan;
2. Perlunya kontrol terhadap setiap tahapan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, sehingga penyusunan rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan secara runut dan sesuai dengan tahapan tahapan yang telah di sepakati;
3. Perlu adanya pengendalian terhadap penyerapan daya serap, khususnya untuk kegiatan yang akan dibatalkan, atau untuk dilakukan penyesesuaian judul kegiatan yang baru.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90
		IKK 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	39
		IKK 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Rumusan NSPK	%	90
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda yang efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Prasarana Transportasi yang Diselaraskan pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda yang	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP yang Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	85

Akuntabel				
	IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi moda	Indeks	90,2
	IKK 9	Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Nilai	81
	IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	77
	IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan	%	87
	IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Indeks	74

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Infrastruktur Konektivitas		
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp 18.006.409.000
Program Dukungan Manajemen		
1.	Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan	Rp 519.084.000
2.	Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp 2.920.111.000
TOTAL		Rp 21.445.604.000

